

**Kapasitas Kelembagaan Kelompok Sadar Wisata
Dalam Pengembangan Desa Wisata Kampung Merah Putih
Di Desa Kaleke, Kabupaten Sigi**

Made Adhitya Saputra^{1*}, Irwansyah Kamindang¹

¹ Universitas Tadulako

Email: madeadhityasaputra060901@gmail.com*

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received : 10 Agustus 2024

Revised : 02 September 2024

Accepted : 04 September 2024

Keywords: Institutional Capacity, Pokdarwis, Tourism Village, Red and White Village

Kata Kunci: Kapasitas Kelembagaan, Pokdarwis, Desa Wisata, Kampung Merah Putih

DOI: 10.62335

ABSTRACT

This research aims to analyze the institutional capacity of the Pokdarwis in Keleke Village, Dolo Barat District, Sigi Regency, in the development of the Kampung Merah Putih tourism village. The approach used is descriptive-qualitative, with data collection through observation, interviews, and documentation. The findings indicate that, while the organization's ability to lead and coordinate and its capacity for external partnerships are functioning, they are not yet optimal. However, the organization's ability to develop tourism products and promote tourism destinations has not been implemented. This is evident from the management of the tourism village, which involves various entities still in the development phase, particularly in terms of integration and optimization of the Pokdarwis management under the BUMDes. Despite various initiatives and collaborations, the development of the tourism village remains fragmented and tends to be individualistic. The tourist sites of Bionga Bathing Place and the Flower Garden have not yet maximized their contribution to the village's original revenue from tourism. The Pokdarwis responsible for tourism development has not effectively managed tourism products. Although there is tourism potential, the development and promotion of tourism still face several challenges. One such challenge is the lack of trained human resources to manage and promote tourism effectively, particularly through social media platforms such as websites created by the Village Tourism Network or Jadesta.

ABSTRAK

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis kapasitas kelembagaan Pokdarwis Desa Keleke, kecamatan Dolo Barat, kabupaten Sigi dalam pengembangan desa wisata Kampung Merah Putih. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek kemampuan organisasi memimpin dan berkoordinasi serta aspek kemampuan organisasi melakukan kemitraan eksternal sudah berjalan namun belum optimal, sedangkan pada aspek kemampuan organisasi mengembangkan produk pariwisata serta aspek

kemampuan organisasi melakukan promosi destinasi wisata belum terlaksana. Hal itu dapat dilihat dari pengelolaan desa wisata yang melibatkan berbagai entitas masih dalam proses pengembangan, terutama dalam hal integrasi dan optimalisasi pengelolaan Pokdarwis di bawah BUMDes. Meskipun terdapat berbagai inisiatif dan kerjasama yang telah dilakukan namun pengembangan desa wisata masih terfragmentasi dan cenderung bersifat individu. Adapun obyek wisata permandian Bionga dan taman bunga terhadap Pendapatan Asli Desa dari sektor pariwisata masih belum maksimal. Pokdarwis yang bertanggung jawab atas pengembangan pariwisata desa belum berhasil mengelola produk-produk wisata secara efektif. Meskipun memiliki potensi wisata namun pengembangan dan promosi pariwisata masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) terlatih dalam mengelola dan mempromosikan potensi wisata secara efektif, terutama melalui platform media sosial seperti website yang dibuat oleh Jaringan Desa Wisata atau Jadesta.

LATAR BELAKANG

Menurut Rahim (2012), Kelompok Sadar Wisata adalah satu elemen warga yang memainkan fungsi dan peran memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan pariwisata di wilayah mereka. Pokdarwis, sebagai alternatif dalam pengembangan pariwisata, berfokus pada kampanye kesadaran wisata. Melalui berbagai kegiatan, kelompok ini terlibat dalam pengembangan pariwisata di nusantara dengan membina warga melalui swadaya atau swakarsa yang bertugas menjadi penggerak pembangunan pariwisata. Pokdarwis adalah pihak yang terdiri dari warga dan berperan dalam memanajemen potensi alam dan budaya untuk menjadikannya sebagai destinasi wisata (Purwanti, 2019).

Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat memerlukan peran aktif dari masyarakat lokal, yang dapat diwujudkan melalui pembentukan Lembaga Swadaya Masyarakat oleh pemerintah daerah. Tujuan dari pembentukan lembaga ini adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dalam menciptakan lingkungan dan suasana yang mendukung pertumbuhan kegiatan pariwisata di destinasi wisata. Salah satu bentuk LSM adalah kelompok sadar wisata disingkat POKDARWIS. Adapun Kelompok sadar wisata ini adalah elemen penting warga yang memberikan nilai signifikan terhadap pengembangan pariwisata diwilayahnya (Sutiani, 2022).

Definisi Pokdarwis menurut peraturan perundang-undangan pariwisata adalah kelompok warga yang bertugas untuk menjaga dan mengembangkan destinasi wisata. Kebijakan terkait pedoman pembentukan dan pengelolaan Pokdarwis merujuk pada beberapa peraturan, yaitu UU No. 10/2009 mengenai Kepariwisata, INPRES RI No. 16/2005 mengenai Kebijakan Pembangunan Kebudayaan & Pariwisata, Permen Kebudayaan & Pariwisata No. PM.07/HK.001/MKP-2007 tentang Organisasi Pedoman Kelompok Sadar Wisata, Permen Kebudayaan & Pariwisata No. PM.04/UM.001/MKP/08 mengenai Sadar Wisata, serta Permen Kebudayaan & Pariwisata No. 11 PM 17/PR.001/MKP/2010 yang mencakup Rencana Strategis Kementerian Kebudayaan & Pariwisata Tahun 2010-2014.

Salah satu desa wisata yang ada di kabupaten Sigi adalah desa wisata kampung merah putih di desa Kaleke, kecamatan Dolo Barat. Dalam pengelolaan desa wisata tersebut, pemerintah desa melibatkan partisipasi masyarakat yang terbentuk dalam Pokdarwis kampung merah putih. Namun dalam perkembangannya, kampung wisata merah putih tersebut tidak berkembang baik sehingga kurang dikunjungi oleh wisatawan. Hal itu menyebabkan kampung wisata merah putih tersebut belum menopang dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, pendapatan asli desa, serta pembangunan desa dari potensi pariwisata yang dimilikinya. Pembentukan Pokdarwis desa Kaleke mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan sebagaimana telah disebutkan diatas, yang kemudian diatur berdasarkan Perda Kabupaten Sigi No. 18/2014 Mengenai Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sigi, serta Surat Keputusan Kades Kaleke No.01/36/KLK-DB/III/2023 Tentang Pembentukan Pokdarwis Desa Kaleke.

Salah satu kelemahan Pokdarwis dalam mengelola kampung wisata merah putih tersebut adalah lemahnya sumber daya baik pengelola maupun organisasi, dalam mengelola dan mengembangkan kampung wisata Merah Putih desa Kaleke. Kelemahan tersebut antara lain keahlian, pengetahuan, pembiayaan, promosi dan sarana pendukung lainnya yang masih kurang memadai. Akibatnya, Pokdarwis kampung wisata merah putih tidak mampu mengembangkan potensi-potensi lainnya yang dimiliki oleh desa Kaleke. Padahal dalam struktur kelembagaan Pokdarwis tersebut terdiri dari unsur masyarakat desa setempat yang dibentuk oleh pemerintah desa setempat. Desa Kaleke memiliki berbagai potensi wisata, seperti menjadi tempat Bendera Merah Putih pertama berkibar di lembah Palu (Kaili) masa penjajahan, maestro seni & budaya, souvenir & pengrajin parang, pembuatan alat musik tradisional tanah Kaili. Selain itu, desa ini juga pernah menjadi ibu kota terakhir Kerajaan Dolo, terdapat taman makam pahlawan nasional yaitu Tombolotutu.

Sejak terbentuknya kampung wisata merah putih, masyarakat desa Kaleke banyak menggantungkan harapan agar wisata tersebut berkembang baik dalam pengelolaannya oleh Pokdarwis sehingga dapat menopang pendapatan ekonomi masyarakat desa dan menopang pendapatan asli desa Kaleke dari sektor pariwisata. Namun demikian, tidak berkembangnya pengelolaan desa wisata kampung merah putih yang dijalankan oleh Pokdarwis, berdampak terhadap perekonomian masyarakat desa, sehingga masyarakat desa tidak menggantungkan sepenuhnya pendapatan ekonomi pada pengelolaan desa wisata tersebut. Oleh karena itu, kemudian masyarakat desa Kaleke sebagian besar mengubah pola hidup atau bergantung mata pencaharian pada bidang perikanan antara lain usaha tambak ikan Mujair, ikan koi, dan ikan tawar lainnya, dan bukan pada desa wisata tersebut.

Terkait kapasitas kelembagaan Pokdarwis, penelitian (Prakitri & Damayanti, 2016) mengenai Kapasitas Kelembagaan Dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Kasus: Desa Wisata Ketenger, Banyumas) menunjukkan di tingkat lembaga, terdapat kapasitas baik kemitraan eksternal, pengembangan potensi wisata, serta penyebarluasan informasi desa wisata. Dalam segi kepemimpinan & koordinasi, Pokdarwis "Ketenger Adventure" kapasitasnya kurang memadai. Pada tingkat individu, kapasitas mereka tergolong baik dalam hal pengembangan potensi wisata, pengelolaan atraksi, penjualan cinderamata, dan pelayanan wisatawan. Meskipun demikian, individu masih menunjukkan kelemahan untuk memahami dan menerapkan konsep desa wisata. Hasil

Penelitian juga mengungkap bahwa warga Ketenger sudah mengikuti berbagai kegiatan meningkatkan kapasitas oleh dinas pariwisata & organisasi lain. Atas temuan ini, disarankan agar ada program lanjutan agar lebih meningkatkan kapasitas warga. Berikutnya penelitian (Purwanti, 2019) mengenai Strategi Kelompok Sadar Wisata Dalam Penguatan Desa Wisata Kungkuk, Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, menunjukkan bahwa strategi kelompok sadar wisata pada penguatan desa wisata Kampung Wisata Kungkuk meliputi bantuan dalam pengajuan sarana dan prasarana kepada Dinas Pariwisata, serta peran aktif dalam promosi wisata. Selanjutnya penelitian (Utomo & Satriawan, 2018) mengenai Strategi Pengembangan Desa Wisata Di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, menunjukkan bahwa Kecamatan Karangploso mempunyai potensi wisata internal & eksternal yang bisa dikembangkan menuju desa wisata. Strategi yang diusulkan meliputi pengembangan kluster desa wisata, pembentukan kelembagaan desa wisata, pengembangan tema desa wisata yang berfokus pada konsep *go green* unik, khas, sehat dengan memanfaatkan hortikultura yang unggul.

Untuk itu penelitian ini akan ditujukan guna menganalisis lebih mendalam terkait peran dan kapasitas kelembagaan Pokdarwis desa Kaleke, di kecamatan Dolo Barat, kabupaten Sigi dalam mengembangkan kampung wisata merah putih, menggunakan kerangka teoritis kapasitas organisasional menurut Damanik Dan Weber (2006), berdasarkan 4 aspek yakni kemampuan organisasi memimpin dan berkoordinasi, kemampuan organisasi melakukan kemitraan eksternal, kemampuan organisasi mengembangkan produk pariwisata, kemampuan organisasi melakukan promosi destinasi wisata.

KAJIAN PUSTAKA

Kapasitas Kelembagaan

Kelembagaan mengacu pada wadah bagi sekelompok individu yang bekerja sama secara sistematis dalam konteks kemasyarakatan dan memiliki struktur organisasi untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, kelembagaan merujuk pada aturan yang ada dalam organisasi atau kelompok masyarakat untuk memfasilitasi kerja sama dalam mencapai tujuan (Ruttan dan Hayami, 1984, dikutip dalam Suwarno et al., 2022). Definisi ini sejalan dengan pemahaman kelembagaan sebagai kumpulan nilai, norma, dan peraturan dalam suatu lembaga yang dirancang untuk mencapai tujuan (Awang, 2005, dikutip dalam Paskasari, 2020). Kelembagaan mencakup kumpulan nilai, norma, dan aturan yang terdapat dalam lembaga untuk mendukung anggotanya dalam mencapai tujuan yang diinginkan, serta melibatkan struktur dan kegiatan organisasi di dalamnya. Menurut Milen (2006) seperti dikutip dalam Alam & Prawitno (2015), kapasitas dapat diartikan sebagai individu, organisasi, sistem yang mampu menjalankan fungsi dengan cara yang efektif, efisien, berkelanjutan. Definisi kapasitas mencakup berbagai elemen seperti pengetahuan, sikap, hubungan, sumber daya, motivasi, keterampilan, nilai-nilai, perilaku, kondisi memungkinkan individu, organisasi, sistem lebih luas, serta jaringan kerja atau sektor, untuk menjalankan fungsi mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dari waktu ke waktu. Pengembangan kapasitas dianggap sebagai tugas spesialis karena terkait dengan unsur yang ada pada organisasi atau sistem saat waktu tertentu. Sesuai pengertiannya menurut Odelia (2018), kapasitas merujuk pada kemampuan dan kompetensi lembaga untuk mengelola perencanaan secara efisien guna memberikan hasil yang bermanfaat bagi

masyarakat yang menjadi tanggung jawab lembaga tersebut. Cox et al. (2020) menjelaskan bahwa kapasitas kelembagaan berfokus pada seberapa baik suatu lembaga dapat menjalankan aktivitasnya dan mencapai tujuannya dengan memanfaatkan nilai, norma, dan regulasi yang ada. Dalam konteks pemerintahan, ini mencakup kemampuan pemerintah untuk mengembangkan, mengatur, dan melaksanakan kebijakan serta mengelola keuangan, informasi, dan sumber daya manusia. Kapasitas kelembagaan juga berpengaruh pada kemampuan lembaga untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Dengan demikian, kapasitas kelembagaan adalah upaya untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam kinerja lembaga melalui penilaian input dan output, benchmarking, serta peningkatan efektivitas. Singkatnya, kapasitas kelembagaan adalah kemampuan lembaga untuk melaksanakan tugas dan fungsi sambil tetap mempertahankan eksistensinya. Proses dan kemampuan lembaga dalam menjalankan tugasnya juga memengaruhi hasil yang dicapai (Darina, 2024).

Menurut Grindle (1997), kapasitas sering dipahami sebagai kemampuan untuk menyelesaikan tugas dengan sukses. Kapasitas dapat berfungsi sebagai jaminan bagi kelangsungan hidup organisasi dan individu. Istilah kapasitas mencakup kemampuan untuk melakukan tugas dengan cara yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Berbagai faktor penting seperti lembaga, perilaku, kebijakan, aturan, kode etik, kontrak, pasar, kepemilikan, organisasi, dan insentif dianggap sebagai elemen utama. Di sisi lain, Ostrom (1990) mendefinisikan lembaga sebagai kumpulan aturan dalam masyarakat yang menentukan siapa yang berwenang membuat kebijakan, tindakan apa yang diperbolehkan atau dilarang, aturan yang diterima secara umum, prosedur yang diikuti, informasi yang boleh atau tidak boleh dipegang, serta manfaat yang didapat individu dari tindakannya. Berbagai lapisan kapasitas dalam masyarakat, termasuk pada tingkat sistem, organisasi, dan individu, dapat membentuk kapasitas lembaga (Miftahul Jannah & Zulkarnaini, 2021).

Menurut Daniel Rickett, seperti yang dikutip oleh Hardjanto (2006), tujuan pengembangan kapasitas adalah untuk memberikan kemampuan kepada organisasi agar mereka dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan dan misi mereka. Menurut Milen (2004), pengembangan kapasitas kelembagaan meliputi baik pendekatan tradisional maupun upaya untuk memperkuat organisasi, dengan perhatian khusus pada sumber daya manusia, proses, dan struktur organisasi (Ratnasari dkk., 2013).

Menurut Djogo dan koleganya (2003), institusi biasanya dianggap sebagai pola perilaku sosial yang mendalam dan bertahan lama. Terdapat dua komponen utama dalam institusi: komponen institusional dan komponen organisasi. Komponen institusional mencakup beragam perilaku sosial yang berhubungan dengan nilai, norma, adat, kebiasaan, praktik, keyakinan, ide, doktrin, keinginan, kebutuhan, dan orientasi. UNDP (1997) menjelaskan bahwa kapasitas kelembagaan dapat dievaluasi berdasarkan level-level kapasitas masyarakat, yakni tingkat sistem, organisasi, dan individu. Chaskin (2001) menjelaskan bahwa kapasitas kelembagaan dapat dievaluasi melalui struktur sistem yang mencakup interaksi antara individu, kelompok informal, dan organisasi formal, yang pada gilirannya membentuk jaringan sosial yang dikenal sebagai modal sosial. Milen (2006) menambahkan bahwa berbagai tingkat organisasi berkaitan dengan struktur, budaya, dan manajemen yang mendukung individu untuk mencapai kinerja yang optimal. Dalam bidang pariwisata, Damanik dan Weber (2006) mengidentifikasi indikator yang berguna untuk menilai kemampuan dan kapasitas organisasi yang mengelola pariwisata desa, termasuk kemampuan organisasi dalam memimpin dan

mengoordinasikan, menjalin kemitraan eksternal, mengembangkan produk wisata, dan mempromosikan destinasi wisata. Kompetensi atau kapasitas individu dapat diukur melalui beberapa indikator. Berdasarkan konsep JICA (2004) yang dirangkum oleh Hamzah dan Khalifah (2012), indikator tersebut mencakup pengetahuan, keterampilan, kesadaran, dan sikap. Berdasarkan teori-teori tersebut, beberapa indikator kontekstual dapat diterapkan untuk menjelaskan tantangan dalam pengelolaan pariwisata desa. Noho (2014) mengidentifikasi indikator yang berhubungan dengan kapasitas masyarakat dalam mengelola pariwisata, seperti kesadaran tentang pengembangan potensi wisata, pemahaman mengenai konsep pariwisata desa, kemampuan dalam melayani wisatawan, keterampilan dalam mengelola souvenir, dan kemampuan dalam mengelola atraksi wisata (Prafitri & Damayanti, 2016).

Pengembangan Desa Wisata

Desa wisata merupakan perpaduan dari atraksi, tempat menginap, dan fasilitas pendukung yang menyatu dengan kehidupan sehari-hari masyarakat desa melalui kebudayaan dan tradisi setempat. Desa ini menawarkan daya tarik khas yang mencakup keindahan lingkungan pedesaan yang alami serta kehidupan sosial dan budaya penduduknya, yang disajikan dengan cara yang alami dan menarik. Tujuan utamanya adalah untuk menarik minat wisatawan dan meningkatkan jumlah kunjungan ke desa tersebut (Suprpto & Sutiarmo, 2021).

Desa wisata merupakan area pedesaan yang memiliki daya tarik unik dan istimewa, baik dalam hal lingkungan fisik maupun aspek sosial dan budaya setempat. Ada dua konsep utama yang menjadi komponen dari desa wisata, yaitu. Pertama, akomodasi merujuk pada bagian tempat tinggal masyarakat atau unit yang berkembang berdasarkan konsep hunian penduduk. Kedua, atraksi mencakup aspek kehidupan sehari-hari masyarakat serta suasana fisik di desa yang memungkinkan pengunjung untuk berintegrasi dan berpartisipasi secara aktif. Penetapan suatu desa sebagai desa wisata harus memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditentukan, sebagai berikut. Pertama, akses jangkauan sangat baik, sehingga pengunjung dapat dengan mudah mencapai tempat ini menggunakan berbagai jenis transportasi. Kedua, memiliki bermacam daya tarik yang dapat dikembangkan menjadi objek wisata. Ketiga, warga dan pihak desa memberikan sambutan serta dukungan yang besar dalam pengembangan desa wisata dan pengunjung yang datang. Keempat, keamanan desa terjamin dengan baik. Kelima, tersedia fasilitas yang memadai. Keenam, memiliki iklim sejuk dan dingin. Ketujuh, terkoneksi dengan objek wisata lain yang sudah dikenal luas oleh masyarakat (Utomo & Satriawan, 2018).

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang dipilih yakni kualitatif, bertujuan mengeksplorasi makna, pengalaman, perspektif, dan interpretasi dari individu atau kelompok (Pahleviannur dkk., 2022). Tipe yang digunakan deskriptif. Tujuannya adalah menyajikan atau menjelaskan masalah dengan cara yang sistematis dan mendetail (Zellatifanny & Mudjiyanto, 2018). Menurut Sugiyono, teknik pengumpulan data merujuk pada metode yang dipakai untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian, yang dapat dilakukan melalui pengamatan, wawancara, kuesioner, studi dokumentasi,

atau metode lainnya (Mar'atusholihah dkk., 2019). Untuk itu pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tahapan, observasi, wawancara mendalam, dokumentasi terkait Pokdarwis di desa Kaleke. Dalam penelitian ini, analisis data bersifat kualitatif, yakni serangkaian proses, termasuk pengorganisasian, penyaringan, pengkodean, dan interpretasi untuk mengidentifikasi pola atau temuan yang signifikan. Dalam analisis data dilakukan melalui proses pengumpulan data, pengurutan data, analisis data, interpretasi dan Kesimpulan (Fiantika dkk., 2022).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pengelola Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Kaleke

Obyek wisata yang dimiliki desa Kaleke dikelola oleh Kelompok Sadar Wisata yang dibentuk pada tanggal 1 Maret 2023. Pembentukan Pokdarwis desa Kaleke berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kaleke Nomor 01/36/CLK-DB/III/2023. Jumlah pengurus Pokdarwis desa Kaleke periode 2023-2024 terdiri dari pelindung yakni kepala desa, ketua, sekretaris, bendahara, dan serta anggota yang berjumlah 21 orang. Dari jumlah keseluruhan pengurus Pokdarwis desa Kaleke, yang aktif menjalankan tugas hanyalah ketua itu sendiri, dan bahkan aktif berkoordinasi kepada kepala desa selaku Pembina Pokdarwis.

Keberadaan Pokdarwis desa Kaleke yang dibentuk pada tahun 2023, mengelola satu-satunya obyek wisata permandian Bionga milik desa Kaleke. Adapun obyek wisata taman bunga Kaleke dikelola oleh swasta atau usaha pribadi dari penyewa lokasi tersebut. Selanjutnya keberadaan obyek wisata air terjun Wera di kelola sendiri oleh kelompok masyarakat di dusun Wera dimana pendapatan obyek wisata tersebut tidak dibawah pengawasan dan pembinaan pemerintah desa Kaleke.

Kapasitas Kelembagaan Pokdarwis Desa Kaleke

Dalam pengembangan pariwisata yang melibatkan masyarakat, penting untuk melibatkan peran aktif dari masyarakat lokal. Hal ini dapat dilakukan dengan mendirikan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) oleh pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan kegiatan pariwisata di destinasi tersebut. Salah satu contoh LSM yang relevan adalah kelompok sadar wisata. Kelompok ini merupakan elemen penting dalam masyarakat yang berkontribusi secara signifikan terhadap pengembangan pariwisata di daerah mereka (Sutiani, 2022).

Dalam pembentukan dan pengelolaan Pokdarwis, pemerintah telah membuat regulasi (peraturan perundang-undangan) sebagai pedoman dalam pelaksanaan, yang terdiri dari UU No. 10/2009 mengenai Kepariwisata, PP No. 50/2011 mengenai Rencana Induk Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025, Instruksi Presiden RI No. 16/2005 mengenai Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata, Permen Kebudayaan dan Pariwisata No. PM. 07/HK.001/MKP-2007 mengenai Organisasi Pedoman Kelompok Sadar Wisata, Permen Kebudayaan dan Pariwisata No. PM.04/UM.001/MKP/08 Mengenai Sadar Wisata, Permen Kebudayaan dan Pariwisata No. 11/PM

17/PR.001/MKP/2010 mengenai Rencana Strategis Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2010-2014.

Melalui pedoman diatas, maka pemerintah desa Kaleke, Kecamatan Dolo Barat membentuk Pokdarwis melalui Surat Keputusan kepala Desa Kaleke Nomor 01/36/KLK-DB/III/2023 Tentang Pembentukan Kelompok Sadar Wisata, pada tanggal 1 Maret 2023. Adapun tugas dan tanggungjawab Pokdarwis desa Kaleke, sebagai berikut. Pertama, merancang rencana program kerja dan kegiatan kelompok. Kedua, menjalin kerjasama dengan pihak lain dalam melaksanakan kegiatan kelompok. Ketiga, melakukan pencatatan, pengelolaan keuangan, dan administrasi kegiatan kelompok secara teratur. Keempat, menyusun laporan perkembangan kelompok dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa. Saat ini desa wisata kampung merah putih dengan segala potensi-potensi wisata yang dimiliki desa Kaleke sebagaimana disebutkan diatas, tidak dapat terlihat lagi oleh para wisatawan yang akan berkunjung di desa tersebut. Obyek wisata yang nampak an tersisa yang bisa dikunjungi oleh para wisatawan hanyalah obyek wisata taman bunga dan obyek wisata permandian Bionga desa Kaleke.

Namun keberadaan obyek wisata taman bunga di desa Kaleke yang ramai di kunjungi oleh para wisatawan, bukan dikelola oleh pemerintah desa melalui Pokdarwis melainkan dikelola oleh individu sebagai penyewa lahan taman bunga tersebut milik warga desa Kaleke. Sebab lahan yang digunakan sebagai obyek wisata taman bunga desa Kaleke bukan lahan asset pemerintah desa Kaleke, melainkan milik pribadi warga desa Kaleke yang disewakan. Namun demikian, lahan parkir kendaraan roda dua dan roda empat menjadi wewenang pengelolaan pemerintah desa dimana retribusi parkir masuk dalam Kas desa Kaleke. Berbeda dengan keberadaan obyek wisata permandian Bionga yang menjadi asset wisata desa dan dikelola oleh Pokdarwis desa Kaleke. Keberadaan obyek wisata permandian Bionga ini adalah satu-satunya obyek wisata yang dimiliki desa Kaleke saat ini. Adapun sumber pendapatan desa melalui obyek wisata permandian tersebut yang dikelola oleh Pokdarwis adalah iuran bulanan warung-warung yang terdapat dilokasi tersebut serta retribusi parkir. Selanjutnya, sumber pendapatan obyek wisata permandian Bionga tersebut digunakan untuk membiayai perawatan dan pemeliharaan.

Kemampuan Organisasi Memimpin Dan Berkoordinasi

Kemampuan organisasi memimpin dan berkoordinasi adalah kemampuan lembaga Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) membangun komunikasi bersama pemerintah desa, masyarakat, dan *stakeholder* dalam mengembangkan desa wisata tersebut. Pada aspek ini, Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) yang dibentuk pada tahun 2023 belum menunjukkan kinerja optimal dalam mengelola obyek wisata kolam permandian Bionga di desa Kaleke. Meskipun pemerintah desa telah memberikan dukungan pendanaan melalui APBDes yang dialokasikan untuk kepemudaan, pengembangan obyek wisata tersebut terkendala masalah pembebasan lahan. Pemerintah desa yang sebelumnya mengelola kolam permandian ini meninggalkan masalah kepemilikan lahan yang sekarang menjadi tugas untuk diselesaikan. Pemerintah desa bersama Pokdarwis berupaya menyelesaikan pembebasan lahan dengan pembayaran ganti rugi melalui BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) yang masih dalam proses reaktivasi. Rencana ke depannya adalah menempatkan Pokdarwis di bawah BUMDes. Meskipun hasil pengelolaan kolam Bionga belum

memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa, pemerintah desa terus berkoordinasi dengan Pokdarwis untuk menyusun konsep pengembangan wisata, mengingat desa Kaleke memiliki banyak potensi wisata yang perlu dikembangkan.

Pencanangan kampung wisata Merah Putih di desa Kaleke dimulai sejak tahun 2013. Pokdarwis desa Keleke mengelola wisata kolam permandian Bionga sejak didirikan oleh pemerintah desa. Meskipun demikian, sistem pembagian hasil pengelolaan belum berkontribusi sebagai Pendapatan Asli Desa (PADes) Kaleke karena hasilnya masih kecil dan digunakan untuk pemeliharaan obyek wisata. Setiap bulan, lima pemilik warung kecil di lokasi Bionga dan pengelola parkir menyetor hasil penjualannya kepada Pokdarwis. Dana ini dialokasikan untuk biaya pemeliharaan dan perawatan kolam permandian Bionga serta upah bagi pekerja di lokasi tersebut. Hasil retribusi parkir pengunjung masih di bagi kepada pemilik tanah yang menjadi lahan parkir, penjaga parkir dan Uang KAS Pokdarwis. Pada awal tahun 2019, pemerintah desa Keleke memberikan kontribusi dengan membangun fasilitas, menata, dan memperluas area permandian Bionga.

Komunikasi antara Pokdarwis dan pemerintah desa terutama terkait keamanan lokasi permandian, termasuk pelarangan penjualan air dari mata air kolam renang Bionga dan penggunaan tangka-tangki mobil untuk mengambil air demi menjaga kelestarian mata air. Kepala desa secara langsung terlibat dalam pengawasan di lokasi kolam permandian ini. Selain itu, Pokdarwis juga berkomunikasi dengan pemerintah desa mengenai pengelolaan sampah di area permandian, dengan namun belum ada realisasi dari pemerintah desa. Taman Bunga Kaleke berada di lahan milik orang kampung Kaleke yang disewa untuk pengelolaan usaha pribadi selama 5 tahun. Usaha taman bunga ini tidak mendapatkan dukungan atau bantuan dari pemerintah desa atau Pokdarwis. Namun, pendapatan dari parkir dan keamanan di lokasi wisata taman bunga ini dikelola oleh desa dengan sistem bagi hasil antara desa dan pemilik lahan yang disewa untuk usaha taman bunga tersebut. Selain itu, air terjun Wera termasuk dalam wilayah dusun desa Kaleke, namun tidak dikelola oleh pemerintah desa Kaleke ataupun Pokdarwis.

Para pemilik warung di sekitar lokasi permandian Bionga ini dikoordinasikan oleh Pokdarwis melalui ketuanya, yang kebetulan juga merupakan salah satu dari pemilik warung. Para pemilik warung selalu berkomunikasi dalam pengelolaan kolam permandian dengan ketua Pokdarwis karena sebagai pemilik warung selama ini melihat bahwa hanya ketua yang sangat aktif dalam menjalankan roda organisasi. Selain itu, ketua Pokdarwis juga menjadi sumber informasi dari pemerintah desa ataupun kepala desa yang diterima oleh para pemilik warung. Semua obyek wisata di daerah tersebut memiliki pengelolaan yang berbeda-beda. Kolam permandian Bionga sejak tahun 2019 dikelola oleh pemerintah desa, tetapi sejak tahun 2023 diserahkan kepada Pokdarwis. Taman bunga Kaleke pengelolaannya dilakukan oleh usaha sendiri. Air terjun Wera dimana warga dusun Wera ingin mengelola sendiri dan bahkan ingin memisahkan diri dari pemerintah desa Kaleke. Pokdarwis saat ini masih berada di bawah pembinaan dan pengawasan pemerintah desa Kaleke. Setelah pembebasan lahan di kolam renang Bionga selesai, rencananya Pokdarwis akan berada di bawah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kaleke. Dengan demikian pada aspek ini menunjukkan walaupun sudah berjalan namun belum optimal. Hal ini ditunjukkan pengelolaan wisata di desa

Kaleke melibatkan berbagai entitas dan masih dalam proses pengembangan, terutama dalam hal integrasi dan optimalisasi pengelolaan oleh Pokdarwis di bawah BUMDes.

Kemampuan Organisasi Melakukan Kemitraan Eksternal

Kemampuan organisasi melakukan kemitraan eksternal adalah kemampuan lembaga Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) membangun kolaborasi bersama *stakeholder* atau lembaga lainnya dalam mengembangkan desa wisata tersebut. Desa Kaleke memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata. Lokasi persawahan di belakang taman bunga memiliki pemandangan yang indah dan dapat menjadi daya tarik. Meskipun upaya kerjasama telah dilakukan, pengembangan wisata masih bersifat individu. Desa ini juga memiliki nilai sejarah karena menjadi tempat pemakaman pahlawan nasional Tombolotutu, meskipun masih menjadi polemik. Pengembangan wisata terus dikoordinasikan dengan Pokdarwis, meskipun banyak pengurus yang belum aktif karena kesibukan kuliah. Namun, beberapa kegiatan telah dilakukan dan didukung oleh pemerintah desa dalam pendanaan melalui dana kepemudaan.

Sebelum adanya Pokdarwis, festival musik Bionga telah diadakan dua kali pada tahun 2021 dan 2022. Setelah itu, pengurus Pokdarwis yang merupakan pemuda dari desa Kaleke dengan sanggar seni pemuda desa tersebut bekerja sama dengan Sanggar Seni pemuda Kololiu desa Kaleke mengadakan festival kampung merah putih pertama pada bulan Februari 2024. Festival ini dipublikasikan melalui website, akun YouTube, Instagram, dan Facebook milik sanggar Kololiu dalam bentuk video dokumenter. Pada aspek lain, pemilik usaha taman bunga di desa Kaleke menjalin kerjasama dengan pemerintah desa, bukan dengan Pokdarwis. Pemerintah desa bertanggung jawab atas pengelolaan parkir di taman bunga serta perizinan usaha taman bunga tersebut. Pemilik usaha taman bunga juga mengaku tidak mengetahui fungsi dan tugas dari Pokdarwis Desa Kaleke, termasuk identitas dari pengurus dan anggotanya.

Pengurus Pokdarwis desa Kaleke terdiri dari anak-anak muda aktif dalam kegiatan seni budaya. Selain itu, hubungan kerjasama antara Pokdarwis dan para pemilik warung di sekitar lokasi kolam permandian Bionga juga terjalin dengan baik, yang dimungkinkan karena salah satu pemilik warung juga menjabat sebagai ketua Pokdarwis. Adapun Pokdarwis awalnya didirikan di bawah BUMDes Kaleke, tetapi karena masalah internal dan belum terlalu eksisnya BUMDes, akhirnya Pokdarwis berada di bawah pembinaan pemerintah desa. Pendirian Pokdarwis ini dipicu oleh keinginan anak-anak muda desa, yang mana desa Kaleke memiliki sanggar seni kepemudaan. Sebagian besar pengurus Pokdarwis berasal dari anggota sanggar seni pemuda Kaleke. Pokdarwis dan sanggar seni pemuda desa Kaleke bekerja sama dalam kegiatan-kegiatan pariwisata di desa tersebut. Kerjasama Pokdarwis dengan lembaga eksternal masih dilakukan melalui Jejaring Desa Wisata (Jadesta) yang didukung oleh Kementerian Pariwisata dan difasilitasi oleh TV Palu.

Dengan demikian pada aspek kemampuan organisasi melakukan kemitraan eksternal menunjukkan sudah terlaksana namun belum optimal. Hal ini dapat dilihat bahwa desa Kaleke memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata. Meskipun terdapat berbagai inisiatif dan kerjasama yang telah dilakukan, pengembangan wisata masih terfragmentasi dan cenderung bersifat individu. Desa ini menawarkan pemandangan alam yang indah, memiliki nilai sejarah, serta aktif dalam kegiatan seni budaya dan festival-festival. Koordinasi untuk pengembangan

wisata di desa dilakukan melalui Pokdarwis, yang melibatkan anak-anak muda dan berkolaborasi dengan pemerintah desa serta lembaga lain seperti Jadesta yang didukung pemerintah pusat.

Kemampuan Organisasi Mengembangkan Produk Pariwisata

Kemampuan organisasi mengembangkan produk pariwisata adalah sebagai kemampuan organisasi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) menciptakan dan mengembangkan produk-produk wisata desa yang inovatif dan menarik. Hingga saat ini desa Kaleke belum memiliki Pendapatan Asli Desa (PADes) yang berasal dari produk-produk wisata. Pendapatan dari parkir di lokasi permandian Bionga dibagi antara pemilik lahan, pengurus Pokdarwis, dan penjaga parkir, sedangkan pendapatan dari parkir di taman bunga dialokasikan untuk pembangunan pesantren Alkhairat di dusun 2 desa Kaleke. Dengan demikian, Pokdarwis belum berhasil mengembangkan produk-produk wisata yang dapat meningkatkan PADes.

Saat ini produk-produk pariwisata dari desa Kaleke, khususnya kerajinan pedang Guma, belum dikembangkan oleh Pokdarwis karena pengrajinnya bersifat pribadi dan tidak dikelola secara kolektif. Meskipun Pokdarwis sudah berkoordinasi dengan pemerintah desa tentang pengembangan produk pariwisata dan telah melakukan pemetaan potensi pariwisata desa Kaleke bersama kelompok sanggar seni Kololiu, belum ada tindak lanjut yang jelas. Pemerintah desa masih fokus pada pembebasan lahan untuk area kolam permandian Bionga, sehingga pembangunan dan pemasaran produk pariwisata belum terlaksana sepenuhnya.

Untuk pemasaran taman bunga di desa Kaleke, pemilik usaha tersebut melakukan sendiri pengembangan dan perawatan bunga-bunga di taman selama 4 bulan. Promosi usaha tersebut banyak dibantu oleh pengunjung yang membagikan pengalaman mereka di media sosial. Selama Pokdarwis berdiri, fokus utamanya adalah mengelola pengelolaan kolam permandian Bionga, sementara produk-produk kerajinan desa Kaleke belum dikembangkan oleh Pokdarwis. Bahkan, meskipun sebagai pedagang makanan di sekitar permandian Bionga, belum ada produk-produk yang menjadi ciri khas desa Kaleke yang dikembangkan atau ditawarkan oleh Pokdarwis. Kerajinan-kerajinan tersebut adalah milik warga desa, dan pemerintah desa Kaleke ingin mendukung produk-produk kerajinan lokal seperti pedang Guma dengan membantu memasarkan melalui Humas pemerintah desa, namun upaya promosi dan fasilitasi yang dilakukan oleh Humas tersebut masih belum mencapai potensi maksimal. Untuk itu, Pokdarwis tidak menjadi bagian yang melakukan pembinaan dan memfasilitasi dalam mengembangkan produk-produk wisata tersebut.

Dengan demikian pada aspek kemampuan organisasi mengembangkan produk pariwisata menunjukkan belum terlaksana. Hal ini dapat dilihat meskipun desa Kaleke memiliki potensi pariwisata seperti permandian Bionga dan taman bunga, serta kerajinan pedang Guma, namun upaya untuk mengembangkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dari sektor pariwisata masih belum maksimal. Pokdarwis, yang bertanggung jawab atas pengembangan pariwisata desa, belum berhasil mengelola produk-produk wisata secara efektif. Koordinasi dengan pemerintah desa telah dilakukan, tetapi belum ada tindak lanjut konkret dalam pengembangan produk wisata. Pemilik usaha lokal seperti pemilik taman bunga atau pedagang di sekitar permandian Bionga juga lebih fokus pada pemasaran produk mereka sendiri daripada kolaborasi dengan Pokdarwis untuk mengembangkan produk pariwisata desa secara kolektif.

Kemampuan Organisasi Melakukan Promosi Destinasi Wisata

Kemampuan organisasi melakukan promosi destinasi wisata adalah kemampuan organisasi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) membangun dan mengembangkan pemasaran dan promosi dalam meningkatkan daya tarik desa wisata tersebut. Sebagai kepala desa, mempunyai mimpi atau visi-misi untuk mengembangkan desa Kaleke menjadi destinasi wisata kuliner salah satunya. Untuk mempromosikan destinasi ini, Pokdarwis masih menggunakan bantuan Humas dan operator pemerintah desa melalui akun media sosial resmi desa Kaleke. Selain itu, terdapat juga akun Instagram @kalekengataku_ yang dikelola oleh Pokdarwis sendiri, dengan sudah memiliki 318 postingan video dan foto, termasuk destinasi populer seperti kolam permandian Bionga.

Promosi wisata Kampung Merah Putih di desa Kaleke dilakukan melalui website Jadesta, jejaring desa wisata, dan media sosial yang disediakan oleh Kementerian Pariwisata. Pokdarwis sendiri tidak memiliki media sosial atau website. Selain menggunakan Jadesta, promosi juga dilakukan melalui website dan media sosial yang dimiliki oleh sanggar seni Kololiu, dalam kerjasama dengan Pokdarwis desa Kaleke untuk mengenalkan potensi pariwisata di daerah tersebut. Untuk pemilik usaha taman bunga tersebut bukanlah penduduk desa Keleke, melainkan dari desa Rarampadende. Karena itu, yang bersangkutan tidak mengetahui informasi tertentu yang mungkin terkait dengan desa Keleke. Lokasi yang di sewa adalah untuk usaha pribadinya. Meskipun demikian, yang bersangkutan mengetahui bahwa objek wisata di desa Keleke mencakup taman bunga, kolam permandian Bionga, dan air terjun Wera. Yang bersangkutan juga menyadari bahwa taman bunga tersebut terkenal atau viral karena banyak pengunjung yang membagikan pengalamannya di media sosial seperti Facebook, Instagram, Tiktok, dan Youtube.

Kolam permandian Bionga cukup ramai terutama di hari libur dan sore hari pada hari kerja, meskipun tidak seramai pada hari libur. Pemilik warung merasa tidak mengetahui secara mendalam apakah Pokdarwis pernah melakukan promosi terhadap kolam renang tersebut. Dalam pengembangan pariwisata di desa Kaleke, terdapat kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempengaruhi kemampuan untuk mengelola potensi wisata dan promosi pariwisata melalui website Jejaring Desa Wisata (Jadesta). Meskipun beberapa anggota Pokdarwis telah mengikuti pelatihan Jadesta, baik Humas pemerintah desa maupun Pokdarwis tidak memiliki akses langsung atau sandi untuk mengelola website tersebut. Selain itu, pengelolaan kerajinan di desa Kaleke dilakukan secara pribadi meskipun pemerintah desa ingin memfasilitasi untuk mempromosikan cara pembuatannya.

Dengan demikian pada aspek kemampuan organisasi melakukan promosi destinasi wisata menunjukkan belum maksimal. Hal itu dapat dilihat meskipun desa Kaleke memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata kuliner dan alam, pengembangan dan promosi pariwisata masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satu tantangannya yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) terlatih dalam mengelola dan mempromosikan potensi wisata secara efektif, terutama melalui platform seperti website Jadesta. Meskipun upaya promosi dilakukan melalui akun media sosial resmi desa dan inisiatif dari Pokdarwis sendiri seperti akun Instagram @kalekengataku_, tetapi kerjasama dengan sanggar seni Kololiu menunjukkan adanya kolaborasi untuk mengenalkan lebih luas potensi pariwisata desa. Dalam hal ini, kerjasama antara berbagai pihak tampaknya menjadi

kunci dalam mengatasi keterbatasan yang ada dalam pengelolaan dan promosi pariwisata desa Kaleke.

KESIMPULAN

Kesimpulan terkait kapasitas kelembagaan kelompok sadar wisata desa Kaleke, kecamatan Dolo Barat, kabupaten Sigi terhadap pengembangan desa wisata kampung merah putih, pada aspek kemampuan organisasi memimpin dan berkoordinasi serta aspek kemampuan organisasi melakukan kemitraan eksternal sudah berjalan namun belum optimal, sedangkan pada aspek kemampuan organisasi mengembangkan produk pariwisata serta aspek kemampuan organisasi melakukan promosi destinasi wisata belum terlaksana.

Berdasarkan Kesimpulan tersebut beberapa rekomendasi yang diajukan sebagai berikut. Pertama, menjadi pemimpin dan koordinator yang efektif adalah kunci untuk mencapai tujuan organisasi. Penting untuk mengembangkan kepemimpinan yang inklusif dan memastikan semua anggota tim terlibat secara optimal dalam setiap inisiatif. Kedua, memperkuat kemitraan eksternal dengan pihak terkait, pemerintah daerah, swasta, dan warga lokal, akan meningkatkan dukungan serta kemungkinan kesuksesan proyek-proyek pariwisata. Berinvestasi dalam hubungan yang berkelanjutan dan saling menguntungkan adalah kunci. Ketiga, terus mengembangkan dan mengadaptasi produk pariwisata sesuai dengan tren dan permintaan pasar adalah esensial. Memahami preferensi wisatawan dan berinovasi dalam pengalaman yang ditawarkan akan memastikan daya saing yang berkelanjutan. Keempat, promosi yang efektif akan meningkatkan visibilitas destinasi wisata. Memanfaatkan strategi digital, kerja sama dengan influencer, dan memanfaatkan media sosial adalah beberapa cara untuk mencapai audiens yang lebih luas dan menginspirasi wisatawan potensial. Melalui hasil penelitian ini pemerintah desa bersama pengelola Pokdarwis dapat memahami pengembangan desa wisata. Namun demikian, hasil penelitian ini pada sisi kedalamannya sangat terbatas. Untuk itu diharapkan penelitian selanjutnya dapat dikembangkan lebih mendalam terkait kapasitas kelembagaan Pokdarwis guna penyempurnaan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Darina, S. (2024). Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Dalam Pelaksanaan Pengawasan Pemilu Di Lampung (Studi Di Bawaslu Provinsi Lampung).
- Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiyati, S., Honesti, L., Wahyuni, S., & Mouw, E. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Mar'atusholihah, H., Priyanto, W., & Damayani, A. T. (2019). *Pengembangan Media Pembelajaran Tematik Ular Tangga Berbagai Pekerjaan*. 7(3).
- Miftahul Jannah, & Zulkarnaini, Z. (2021). Kapasitas Kelembagaan dalam Pengembangan Arboretum Gambut Sungai Pakning Kabupaten Bengkalis. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(2), 191–201. [https://doi.org/10.25299/jiap.2021.vol7\(2\).7469](https://doi.org/10.25299/jiap.2021.vol7(2).7469)

- Pahleviannur, M. R., Pd, S., Saputra, D. N., Pd, S., Sn, M., Mardianto, D., Sinthania, N. D., Kep, S., Kep, M., Hafrida, L., Pd, S., Si, M., Bano, V. O., Si, S., Pd, M., Susanto, E. E., Ak, M., Amruddin, D., Pt, S., ... Lisya, M. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Prafitri, G. R., & Damayanti, M. (2016). Kapasitas Kelembagaan Dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Kasus: Desa Wisata Ketenger, Banyumas). *Jurnal Pengembangan Kota*, 4(1), 76. <https://doi.org/10.14710/jpk.4.1.76-86>
- Purwanti, I. (2019). Strategi Kelompok Sadar Wisata Dalam Penguatan Desa Wisata. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 8(3).
- Ratnasari, J. D., Makmur, M., & Ribawanto, H. (2013). *Pengembangan Kapasitas (Capacity Building) Kelembagaan Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jombang*.
- Suprpto, I. N. A., & Sutiarto, M. A. (2021). *Tata Kelola Destinasi Pariwisata Desa Tenganan Pegringsingan, Karangasem-Bali*.
- Sutiani, N. W. (2022). *Peran Serta Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dalam Pengembangan Desa Wisata di Desa Taro Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar*. 04(02).
- Utomo, S. J., & Satriawan, B. (2018). Strategi Pengembangan Desa Wisata di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. *Neo-Bis*, 11(2), 142. <https://doi.org/10.21107/nbs.v11i2.3381>
- Zellatifanny, C. M., & Mudjiyanto, B. (2018). Tipe Penelitian Deskripsi Dalam Ilmu Komunikasi. *Diakom : Jurnal Media dan Komunikasi*, 1(2), 83–90. <https://doi.org/10.17933/diakom.v1i2.20>